

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, Pilkada menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah yang demokratis yang dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan nama “Pilkada” merupakan sebuah konsensus politik nasional, yang terlahir dari sebuah proses reformasi yang menghadirkan otonomi daerah seluas-luasnya di Indonesia yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat. Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*decentralisation*).¹ Salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih kepala daerah. Kebijakan ini merupakan hal yang sangat fundamental sebagai kelanjutan dari arus perubahan yang sangat kuat terutama sejak tahun 1996.

Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pilkada pertama

¹ M. Mas'ud Said. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press, Hlm. 74-75.

kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.²

Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 24 September tahun 2014 membahas tentang rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dimana terjadi perubahan besar, yaitu pergeseran pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.³

Dalam lingkup nasional Pilkada di Indonesia serentak pertama kali dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 di 269 daerah, yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 Kabupaten. Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah digelar secara serentak

² Tribatanews. 2020. "Sejarah Pilkada di Indonesia". Selengkapnya di <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/sejarah-Pilkada-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 27 September 2022 pada pukul 14:43 WIB.

³ Ali Marwan Hsb. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUndang-Undang-Ix/2013". *Jurnal Legilasi indonesia*, Vol. 13, NO. 0. Hlm. 227 – 234.

untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada bulan Desember total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 kota.⁴ Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.⁵ Dalam melakukan rekrutmen ini juga ada yang harus diperhatikan yaitu keterwakilan perempuan.

Menurut Jimly Asshiddiqie perwakilan rakyat terbagi dalam 2 (dua) prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi dan perwakilan fisik atau keterwakilan fisik, dalam keterwakilan fisik tidak ada jaman bahwa wakil rakyat akan menyuarakan aspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya, sistem pemilu, kepartaian bahkan pribadi masing-masing wakil. Keterwakilan perempuan merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif,

⁴ Kabar24. 2020. "Pilkada Serentak 2020 : 13 Daerah di Sumbar Memilih Bupati/Wali Kota, Begini Populasinya". Selengkapny di Kabar24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200729/15/1272725/Pilkada-serentak-2020-13-daerah-disumbar-memilih-bupatiwali-kota-begini-populasinya> diakses pada 30 September 2022 pada pukul 21.32 WIB.

⁵ Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 115.

yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.⁶

Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam politik diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dalam hal ini sering didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Sudah sebaiknya pelaksanaan Pilkada tersebut melibatkan perempuan didalamnya. Pertanyaan ini penting berkaitan dengan Pilkada sebagai alat demokrasi, dimana demokrasi secara substantif tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontes politik bagi kalangan laki-laki.⁷

Realitas partisipasi perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Hal itu terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-

⁶ Zikra Putri Irmalinda. 2019. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019". *Jom Fisip*. Vol. 6, No. 2. Hlm. 6.

⁷ Syalfia. 2014. "Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*. Hlm. 2.

lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para pejuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Perlunya perempuan didalam politik merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan mampu melahirkan generasi perempuan yang lebih maju lagi dan melahirkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik sangatlah rendah. Perempuan dan laki-laki adalah dua kategori politik yang utama sangat perlu keduanya diwakili dalam politik untuk mencapai proses demokrasi yang baik.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik, Pertama, kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik. Kedua, birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada wanita dalam penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki. Ketiga, adanya tafsir agama yang melarang wanita berkecimpung di ruang publik. Empat, faktor internal wanita itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman

⁸ Tri Damayanti. 2021. "Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)". Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. *Skripsi*. Hlm. 3.

tentang hak-hak politik yang masih rendah. Lima, kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan wanita. Kalaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya. Enam, kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas wanita di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.⁹

Pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang dilaksanakan di Sumatera Barat yang diikuti oleh Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. Dari 13 Kabupaten/kota tersebut akan mencoblos dua kali, selain memilih gubernur, mereka sekaligus menentukan siapa bupati atau wali kota.

Pemilihan umum Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 adalah pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021 – 2026. Pemilihan ini digelar bersamaan dengan Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020. Menariknya pada Pilkada serentak tahun 2020 ini, dari empat pasangan calon di Kabupaten Tanah Datar ada kandidat pasangan calon perempuan yang berani ikut dalam pesta akbar demokrasi ini. Pasangan nomor urut empat yaitu Betti Shadiq Pasadigoe dengan pasangannya Edytiawarman yang akan bertarung untuk menjadi nomor satu di Kabupaten Tanah Datar.

⁹ Ade Muslimat. 2020. “Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 7, No. 2. Hlm. 138.

Betti Shadiq Pasadigoe¹⁰ adalah istri dari Shadiq Pasadigoe mantan bupati Kabupaten Tanah Datar dua periode. Ia pernah menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dekranasda, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013). Selama masa menjadi istri bupati, ia meraih penghargaan Citra Kartini Indonesia dari Citra Kartini Indonesia Jakarta (2008), Citra Wanita Pembangunan dari Citra Prestasi Anak Bangsa Jakarta (2008), Manggala Karya dari BKKBN Pusat (2009), dan Kartini Indonesia dari Kharisma Indonesia Foundation Jakarta (2010). Betti mengakhiri karier profesionalnya dengan menjadi Direktur Dana Pensiun Semen Padang (2010-2013).¹¹

Betti Shadiq Pasadigoe juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019 Komisi IX dari fraksi Golkar dan satu satunya perempuan dari ranah Minang yang duduk di parlemen ketika itu. Pada Pilkada serentak 2020 ini Betti Shadiq Pasadigoe adalah satu satu bakal calon bupati wanita yang lolos dan siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2020. Tidak hanya di Kabupaten Tanah Datar saja, tetapi untuk seluruh Pilkada diseluruh Sumatera Barat hanya Betti calon perempuan. Patut diacungi jempol karena diantara jutaan perempuan yang ada di ranah Minang, Betti Shadiq Pasadigoe memang pemberani dan memiliki jiwa pemimpin yang patut dicontoh. Betti Shadiq Pasadigoe

¹⁰ Mpr.go.id. 2015. “Profil Ringkas Betti Shadiq Pasadigoe”. Selengkapnya di <https://www.mpr.go.id/profil/anggota/betti-shadiq-pasadigoe-seakt-mm->. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 18.32 WIB.

¹¹ *ibid*

berani menentang opini publik bahwa di Minangkabau masih agak jarang perempuan yang maju menjadi pejabat politik. Tetapi kini sudah masanya perempuan berkarir di politik.¹²

Shadiq Pasadigoe adalah seorang bupati yang terbilang sukses dan salah satu bupati yang berprestasi, selama dua periode masa jabatannya banyak gebrakan dan kemajuan yang telah dilakukan Shadiq dalam memimpin sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar ini. Banyak pujian yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan Shadiq selama menjabat sebagai bupati di Tanah Datar. Bahkan tak sedikit pula dari masyarakat yang menginginkan Shadiq dapat menjadi Gubernur dan memimpin Sumatera Barat kedepannya.¹³

Shadiq sudah mempunyai karir panjang. Mulai dari awal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu mengemban berbagai jabatan, sampai menjadi Bupati dua kali periode bahkan di percaya menjadi Sekretaris Jendral Asosiasi Bupati se-Indonesia. Selain kiprah besar dalam PNS, ia juga pernah tampil sebagai tokoh pemuda dalam organisasi mekanisme sentral penyalur aspirasi pemuda seperti AMPI dan KNPI Sumatera Barat.

¹² Jurnal Minang. 2020. “Wanita Pemberani itu Betti Shadiq Pasadigoe”. Selengkapnya di <https://jurnalminang.com/> Wanita Pemberani itu Betti Shadiq Pasadigoe/. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 23.58 WIB.

¹³ Tanahdatar.go.id. 2014. “Dukungan Kepada M.Shadiq Sebagai Cagub Terus Mengalir”. <https://tanahdatar.go.id/berita/700/dukungan-kepada-m-shadiq-sebagai-cagub-terus-mengalir.html>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 15.20 WIB.

Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar, Shadiq dicatat sukses di era sejarah otonomi daerah. Fakta pujian yang diberikan kepada Shadiq selama memimpin, ia bertabur bintang dan prestasi serta mendapat reputasi baik disebut “bupati berprestasi”. Di antara beberapa fakta kinerja dan kompetensi gemilangnya sebagai bupati. Berikut penelitian ini memaparkan prestasi yang telah diraih oleh seorang M. Shadiq Pasadigoe:

1. Berprestasi dan meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan, memotivasi dalam melakukan inovasi dan memajukan mutu pendidikan dari usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan sampai ke tingkat perguruan tinggi yang ada di daerahnya. Tingkat perguruan tinggi misalnya STAI saja dapat di dongkrak bersama-sama bersiap-siap menjadi IAIN
2. Berprestasi dalam penyelenggaraan anggaran dan seperti berlangganan meraih WTP dari hasil pemeriksaan dan audit dari aparat keuangan negara seperti BPK.
3. Berprestasi dalam pemberian pelayanan publik prima
4. Berprestasi dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah
5. Berprestasi dalam penanggulangan kemiskinan
6. Berprestasi dalam pengembangan kebudayaan di antaranya pelestarian cagar budaya, menggiatkan event puncak Pagaruyuang Fair
7. Penghargaan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dari Presiden

8. Mendapat Satyalencana Kebhaktian Sosial (SLKS) sebagai penghargaan tertinggi terhadap kepala daerah yang punya kepedulian terhadap persoalan sosial.¹⁴

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengapresiasi keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bapak Shadiq. Menurut catatannya, banyak prestasi prestisius, di antaranya langganan penerima Prediket WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sekaligus yang tercepat menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada BPK, kabupaten terbaik dalam mengelola pendidikan di Sumatera Barat, kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dan serta penghargaan lainnya. Shadiq Pasadigoe merupakan Bupati Kabupaten Tanah Datar dua kali periode yang cukup berpengaruh dan menjadi pemimpin panutan di kalangan masyarakat Tanah Datar. Dalam hal ini, sikap dan dukungan Shadiq Pasadigoe cukup didengar dan dipatuhi serta berpengaruh bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Hal ini terlihat dari dukungan M. Shadiq Pasadigoe dan menjadi juru kampanye Betti Shadiq Pasadigoe di Tanah Datar. Selain itu, nama belakang Betti menggunakan nama Shadiq Pasadigoe sebagai salah satu upaya untuk mempengaruhi masyarakat dalam mendongkrak popularitas serta suara untuk Betti Shadiq Pasadigoe

Pada Pilkada serentak yang digelar di bulan Desember tahun 2020 sayangnya Betti Shadiq Pasadigoe dinyatakan kalah. Betti Shadiq Pasadigoe hanya memperoleh

¹⁴ Darman munir. 2015. Sebagai mana dikutip Yulizal Yunus. Memenangkan Hati Rakyat, IRSECD, Padang, hlm 9.

suara sebanyak 38.199 atau 24,8% (persen). Berdasarkan hasil KPU Kabupaten Tanah Datar Betti Shadiq Pasadigoe dikalahkan oleh pasangan calon nomor urut 3 yaitu Eka-Richi dengan perolehan suara jauh mengungguli sebanyak 65.318 atau 42,4% (persen).¹⁵

Banyaknya calon perempuan gagal terpilih disebabkan oleh dua faktor, yakni (a) faktor eksternal meliputi faktor kampanye, tim sukses, perolehan suara partai dan suara individu (b) faktor internal meliputi strategi politik yang memuat modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Faktor yang paling umum menjadi alasan gagalnya perempuan dipemilihan umum yakni status mereka yang sampai saat ini masih dianggap tidak bisa menduduki wilayah-wilayah sentral suatu wilayah. Perempuan dianggap tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, karena perempuan diidentikkan dengan makhluk yang perasa, makhluk yang lebih suka menggunakan perasaan dibanding dengan logika.¹⁶

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang fokus isunya membahas tentang tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada ataupun pemilu, adapun penelitiannya adalah: *pertama*: penelitian dari Rini Sulastri¹⁷ berjudul “Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca

¹⁵ Langgam.id. 2020. “Update Hasil Pilkada Tanah Datar: Hitungan KPU Hingga Kamis, 10 Desember Pagi”. Selengkapnya di <https://langgam.id/update-hasil-pilkada-tanah-datar-hitungan-kpu-hingga-kamis-10-desember-pagi/>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2022 pada pukul 20.07 WIB.

¹⁶ Hatira. 2021. “Perempuan Dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan Dalam Pileg 2019 Di Kabupaten Luwu Utara”. Uin Alauddin Makassar. *Skripsi*. Hlm. 4.

¹⁷ Rini Sulastri . 2020. “Hambatan Dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action”. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 2.

Affirmative”. *Kedua*: penelitian dari Antik Bintari¹⁸ berjudul “Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan”. *Ketiga*: penelitian dari Putri Kumalasari¹⁹ berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Incumbent Perempuan Pada Pemilihan Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2014”. *Keempat*: Ane Permatasari dan Budi Winarno²⁰, berjudul “Hambatan-Hambatan Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Kelima*: penelitian dari Hatira²¹ berjudul “Perempuan Dan Politik: Studi Terkait Kegagalan Perempuan dalam Pileg 2019 di Kabupaten Luwu Utara”.

Tantangan bagi perempuan calon kepala daerah adalah harus punya strategi kampanye dan keterikatannya dengan akar rumput, merupakan salah satu penentu kesuksesan karena nasib masing-masing kandidat calon kepala daerah pada akhirnya bergantung pada pilihan rakyat. Terlebih dengan mekanisme Pilkada langsung saat ini, kepiawaian kandidat untuk mendekati diri dengan pemilih merupakan faktor yang menentukan bagaimana pada akhirnya pemilih menjatuhkan pilihan padanya. Di sini, peran dari partai (jika diusung partai) atau tim suksesnya memainkan peran yang sangat penting pula untuk dapat membantu kandidat perempuan ini mengikatkan dirinya dengan pemilih. Apalagi terkadang ketika kandidat perempuan dihadapkan langsung dengan pemilih, kemungkinan munculnya sentimen terkait isu-isu gender

¹⁸ Antik Bintari. 2020. “Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 1, No. 1

¹⁹ Putri Kumala Sari. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Incumbent Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Dprd Kota Semarang Tahun 2014”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Universitas Diponegoro*.

²⁰ Ane Permatasari dan Budi Winarno. 2009. “Hambatan-Hambatan Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Universitas Gadjah Mada. *Thesis*.

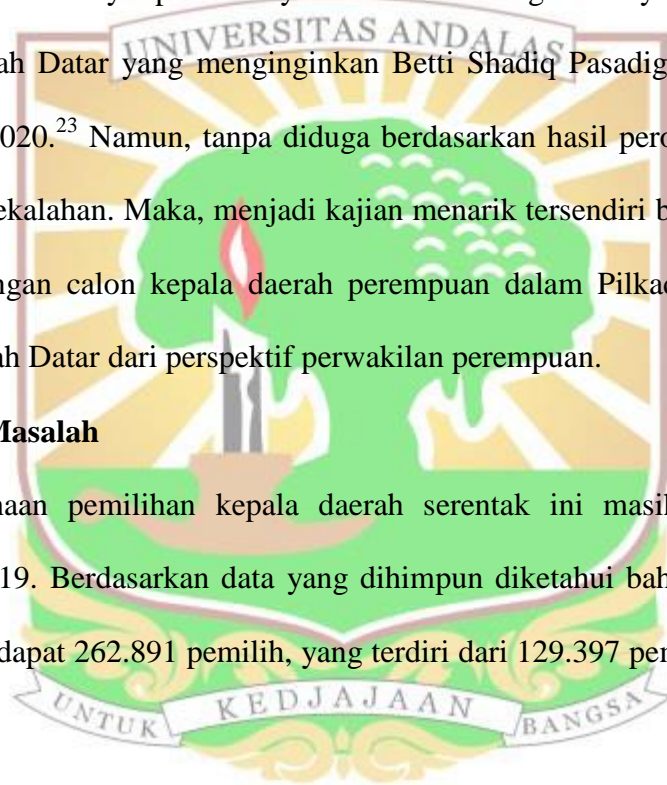
²¹ Hatira. *Op.Cit*

yang berhubungan dengan penerimaan budaya, agama, dan tradisi, bisa saja muncul. Di sinilah kandidat perempuan seringkali dihadapkan pada aspek penerimaan publik atas identitasnya sebagai perempuan.²²

Berangkat dari keadaan tersebut, ketika munculnya politisi perempuan yang menyatakan siap bertarung menuju kursi bupati periode berikutnya pada wilayah yang masih kuat budaya patriarkinya. Ditambah dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang menginginkan Betti Shadiq Pasadigoe untuk maju di Pilkada tahun 2020.²³ Namun, tanpa diduga berdasarkan hasil perolehan suara yang terjadi adalah kekalahan. Maka, menjadi kajian menarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar dari perspektif perwakilan perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini masih dalam suasana pandemi covid-19. Berdasarkan data yang dihimpun diketahui bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat 262.891 pemilih, yang terdiri dari 129.397 pemilih laki-laki dan



²² Zakiah. 2020. "Tantangan Perempuan Menjadi Kepala Daerah". Selengkapnya di <https://Sumbarprov.Go.Id/Home/News/19118-Tantangan-Perempuan-Menjadi-Kepala-Daerah>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 18.42 WIB.

²³ Golkarpedia. 2020. "Ramaikan Pilbup Tanah Datar, Ini Profil Singkat Betti Shadiq Pasadigoe". Selengkapnya di <https://golkarpedia.com/id/baca/16246-ramaikan-pilbup-tanah-datar-ini-profil-singkat-betti-shadiq-pasadigoe>. Diakses pada tanggal 09 November 2022 pada pukul 21.28 WIB.

133.494 pemilih perempuan yang akan menyalurkan hak suaranya di 879 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 Kecamatan dan 75 Nagari.²⁴

Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar diikuti oleh empat pasangan calon. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 49/PL.02.3 Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020.²⁵ KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan sebagai berikut: nomor urut (1) Zudafri Darma – Sultani. (2) Jon Enardi – Syafrudin. (3) Eka Putra – Richi Aprian. (4) Betti Shadiq – Edytiawarman.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah hal yang sangat berarti, sebab diyakini bisa memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Beberapa komponen penting yang dapat digunakan untuk mencari tahu penyebab masih minimnya kepemimpinan perempuan di tingkat lokal antara lain dengan melihat (1) basis dukungan, (2) proses rekrutmen, (3) kaderisasi, (4) ikatan dengan akar rumput, dan (5) strategi kampanye yang dilakukan oleh kandidat perempuan.²⁶

²⁴ Prokabar. (2020). “DPT Tanah Datar Ditetapkan, Pemilih Naik 6.034 Orang Dibandingkan DPS”. Selengkapnya di <https://prokabar.com/dpt-tanah-datar-ditetapkan-pemilih-naik-6-034-orang-dibandingkan-dps/>. Diakses pada tanggal 14 November 2022 pada pukul 20.00 WIB.

²⁵ Kpu.go.id. 2020. “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 49/Pl.02.3 Kpt/1304/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020”. Selengkapnya di https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/tanahdatar/data_abstrakkepkpu/ABS%2049%20THN%202020.pdf. Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 14.31 WIB.

²⁶ Redaksi Websit. 2018. “Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa: Masalah Struktural Atau Kultural?”. Selengkapnya di <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender->

Menurut Betti Shadiq Pasadigoe, keinginan untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Tanah Datar Priode 2021-2026 tersebut karena banyaknya permintaan dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Terutama dari kaum *Bundo Kanduang* dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat baik itu di rantau maupun di kampung.²⁷ Adapun bekalnya untuk menjadi calon bupati adalah pengalamannya selama 10 tahun mendampingi Shadiq Pasadigoe menjadi bupati Kabupaten Tanah Datar, ditambah dengan pengalamannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 5 tahun. Sehingga dia sangat mengetahui bagaimana kiat-kiat untuk memimpin dan membangun Kabupaten Tanah Datar kedepan.

Kekalahan Betti - Edytiawarman tak diduga karena jika dilihat dari *track record* dan juga ia istri dari seorang mantan Bupati terpilih. Hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa pasangan baru Eka - Richi memenangkan Pilkada mengalahkan petahana nomor urut 1 yaitu Zuldafridarma-Sultani yang merupakan mantan wakil bupati pada periode sebelumnya dengan persentase suara 27,2% dan pasangan nomor urut 2 yaitu Jon Enardi - Syafruddin dengan persentase suara 5,6 % dan juga mengalahkan pasangan Betti - Edytiawarman dengan persentase suara 24,8%.²⁸

[agama/hambatan-perempuan-calon-kepala-daerah-dari-masa-ke-masa-masalah-struktural-atau-kultural/](#). Diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pada pukul 17.56 WIB.

²⁷ Portalberitaeditor.com. 2019. "Betti Shadiq Pasadigoe, Siap Maju Jadi Calon Bupati Tanah Datar". Selengkapnya di <https://www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFBetti-shadiq-Pasadigoe-siap-maju-jadi-calon-bupati-tanah-datar/>. Diakses pada tanggal 02 November 2022 pada pukul 17.42 WIB.

²⁸ <https://kab-tanahdatar.kpu.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 November 2022 pada pukul 17.52 WIB.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Paslon Pada Pilkada tahun 2020
di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Calon	Partai pendukung	Perolehan Suara	Persentase
1.	Zuldafri Darma – Sultani	GOLKAR, PKS	41.929 Suara	(27,2 %)
2.	Jon Enardi – Syafruddin	HANURA, NASDEM, PDIP	8.671 Suara	(5,6%)
3.	Eka Putra – Richi Aprian	DEMOKRAT, GERINDRA	65.318 Suara	(42,4%)
4.	Betti Shadiq Pasadigue – Edytiawarman	PPP, PAN	38.199 Suara	(24,8%)

Sumber: Data Sekunder KPU Tanah Datar

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pasangan Eka-Richi memiliki jumlah suara yang jauh berbeda dengan pasangan Betti - Edytiawarman. Hal ini cukup mengejutkan karena menurut hasil survei yang dilakukan Arah Baru Center (ABC) yang elektabilitas mencapai 31,7 persen.²⁹ Nama Betti di posisi teratas disebabkan dia dikenal sebagai politisi perempuan yang dekat dengan masyarakat. Baik saat menjadi ketua PKK Kabupaten Tanah Datar dari 2005 hingga 2015, maupun ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini dibuktikan dengan wawancara salah satu peneliti Arah Baru Center (ABC) Erizal, ia mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kabupaten Tanah Datar menganggap Betti sosok yang dekat dengan masyarakat, sejak menjadi istri bupati hingga menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal itu membuat elektabilitas Betti melambung tinggi, suami beliau juga ikut memberi pengaruh positif pada Betti. Dan juga pemilih Kabupaten Tanah Datar berharap Betti mampu

²⁹ Jurnal Sumbar. 2020. “Pilkada Tanah Datar, Betti Shadiq Pasadigoe Paling Unggul Versi Survey Arah Baru”. Selengkapnya di <https://jurnalsumbar.com/2020/03/Pilkada-tanah-datar-betti-shadiq-Pasadigoe-paling-unggul-versi-survey-arabaru/>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2022 pada pukul 15.27 WIB.

memberi perubahan pada Kabupaten Tanah Datar andaikan maju dan terpilih menjadi Bupati”.³⁰

Dalam konteks perempuan yang memiliki elektabilitas tinggi misalnya perempuan berlatar belakang legislator—partai yang pragmatis menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju memimpin pemerintahan. Perempuan berlatar belakang legislator misalnya, telah mengumpulkan kekuatan politik yang dimilikinya saat ia menjadi anggota legislatif. Kemudian perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat dimana ia bertugas sebagai anggota legislatif. Hal ini membuat perempuan mantan anggota legislatif mempunyai elektabilitas yang tinggi. Namun, tak melihat konsolidasi politik perempuan ini. Ini tantangan tersendiri bagi perempuan ditengah peluang yang ada.³¹

Pandangan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki lagi-lagi menjadi penyebab dukungan yang kurang maksimal terhadap calon anggota legislatif perempuan. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Pikiran-pikiran seperti ini yang terus berulang dimasyarakat sehingga membuat perempuan dinilai tidak cukup baik untuk memimpin. Perempuan dianggap akan menanggung beban ganda jika mereka juga terjun ke wilayah publik.

Kabupaten Tanah Datar juga tidak terlepas dari budaya patriarki. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya

³⁰ Wawancara peneliti dengan peneliti ABC Erizal, peneliti senior Sumatera Barat, pada tanggal 17 Maret 2020.

³¹ Zakiah. *Op.Cit.*

kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.³² Laki-laki berperan sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan dianggap hanya memiliki sedikit pengaruh bahkan dianggap tidak memiliki banyak hak dalam ruang-ruang publik, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Dari fenomena diatas, peneliti berasumsi bahwa tantangan calon kepala daerah perempuan Betti Shadiq Pasadigoe dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh adanya pandangan *stereotipe* bahwa pada dasarnya semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan jabatan dalam kontestasi politik tanpa adanya legitimasi bahwasannya yang berhak untuk hal tersebut adalah kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi. Asumsi peneliti ini diperkuat dengan pernyataan salah satu tim sukses Betti yang bernama Muhammad Riko yang mengatakan bahwa :

“Kekalahan itu disebabkan oleh adanya pro dan kontra tentang kepemimpinan seorang perempuan di Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang. Itu dasarnya kekalahan Bu Betti, masak Bundo Kandung yang memimpin daerah sementara Niniak Mamaknya ada pada Pilkada 2020 di Tanah Datar”.³³

³² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. 2017. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. *Share: Social Work Jurnal*, Vol.7, No.1. Hlm.72.

³³ Wawancara peneliti dengan tim sukses Betti yang bernama Muhammad Riko, pada tanggal 2 November 2022 pada pukul 16.40 WIB.

Women Research Insitutute juga menyimpulkan beberapa hambatan yang membuat perempuan sulit bersaing dengan laki-laki dalam berpolitik. Pertama, perempuan “kalah start” dengan laki-laki dalam berpolitik. Kedua, beban berlapis yang dimiliki perempuan (*privat, public, dan komunitas*). Ketiga, kemampuan ekonomi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keempat, Pendidikan politik yang dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kelima, label nilai patriariki lewat budaya terhadap perempuan.³⁴

Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya perempuan dalam politik, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik. Aktivitas dianggap tidak layak bagi perempuan, karena sifat-sifatnya yang jauh dari citra perempuan.³⁵

Kendala eksternal antara lain dari birokrasi yang paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain

³⁴ Andi Muhammad Sary Sakti. 2022. “Tantangan Perempuan Dalam Dunia Politik Indonesia”. Selengkapnya di <https://Thecolumnist.Id/Artikel/Tantangan-Perempuan-Dalam-Dunia-Politik-Indonesia-2252>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 15.14 WIB.

³⁵ Ridho Gilang Amalsyah Saragih. 2021. “Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara”. *Local History and Heritage* Vol. 1, No. 2. Hlm. 45

berada pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah adalah: apa saja tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada: Studi Kasus Calon Bupati Betti Shadiq Pasadigoe Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: menganalisis dan mendeskripsikan tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Terutama mengenai kajian-kajian tentang tata kelola pemilu dan studi kebijakan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi calon kandidat, tim sukses dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan bagi pasangan kandidat Betti Shadiq Pasadigoe - Edytiawarman jika ingin mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya.

³⁶ *Ibid.*